



There is no trust more sacred than the one the world holds with children. There is no duty more important than ensuring that their rights are respected, that their welfare is protected, that their lives are free from fear and want and that they can grow up in peace

- Kofi Anan -



Lalu... apa yang IJRS lakukan untuk Anak di Indonesia?



Terlibat dalam Penyusunan Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bersama Mahkamah Agung

Salah satu tujuan dari penyusunan buku saku ini adalah menjadi acuan bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin dalam memastikan langkah-langkah pencegahan dampak buruk perkawinan anak. Selain itu, juga memastikan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam proses pemeriksaan.



Terlibat dalam Penyusunan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penganganan Perkara Pidana

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk merespon permasalahan yang seringkali dihadapi oleh Penuntut Umum dalam menangani perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, terutama dalam membuktikan unsur pidana dikarenakan minim saksi dan alat bukti.



Survei terkait Barometer Kesetaraan Gender bersama dengan INFID

Survei ini dilakukan di 34 Provinsi dan pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Survei ini salah satunya dilakukan untuk melihat respons masyarakat mengenai perubahan undang-undang tentang perkawinan khususnya mengenai peningkatan usia perkawinan.

Pada survei ini juga dilihat secara detail mengenai perkawinan anak, dilihat bagaimana persepsi masyarakat terkait perkawinan anak, persepsi terhadap alasan menikahkan anak, persepsi terkait resiko perkawinan anak dan prevalensi perkawinan anak.



Unduh publikasi IJRS di bit.ly/Publikasi-IJRS

Saat ini, IJRS juga terlibat aktif dalam advokasi perkawinan anak dengan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak



Prinsip pencegahan perkawinan anak perlu dipahami oleh siapapun. Maka, IJRS bersama dengan Mahkamah Agung RI sedang menyusun modul e-learning bagi para hakim dalam memahami Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Harapannya, Hakim dapat lebih mengutamakan hak dan kepentingan terbaik bagi anak saat membuat keputusan dispensasi kawin.